



Pemkot Jemput Bola Pembayaran PBB

■ Yulianingsih

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan jemput bola pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di masyarakat. Hal ini dilakukan karena kecenderungan wajib pajak yang membayar pajak mendekati jatuh tempo.

Kabid Pajak Daerah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta Tugiarto mengata-

kan pelayanan pembayaran PBB dilakukan hingga di tingkat RW. "Layanan jemput bola diadakan dengan pekan pembayaran PBB di tingkat RW," katanya, Ahad (28/9).

Layanan serupa dibuka di setiap kantor kecamatan yang sudah dijadwalkan dengan bekerja sama BPD DIY. Menurutnya, jemput bola layanan pembayaran PBB di tingkat RW dilakukan hingga H-1 sebelum jatuh tempo pada 30 September.

Sementara pelayanan di

kecamatan sampai hari saat jatuh tempo. Jika pembayaran terlambat, wajib pajak akan dikenakan denda dua persen dari besaran pajak terutang yang harus dibayarkan tiap bulan. Denda maksimal yang diberikan hanya sampai 48 persen atau sampai 24 bulan. "Imbauan dan sosialisasi pembayaran PBB terus dilakukan," ujarnya.

Ia mengakui sebelumnya pemkot juga menambah pelayanan pembayaran PBB melalui kantor pos di seluruh Indo-

nesia. Dengan demikian, warga luar daerah yang memiliki properti di Kota Yogyakarta dapat membayar di kantor pos manapun.

Tugiarto menjelaskan, pihaknya belum dapat memberikan penilaian terkait tambahan pelayanan melalui kantor pos apakah berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB. Hal tersebut mengingat baru dua pekan terakhir ini pelayanan PBB melalui kantor pos dilakukan.

Namun dia mengata-

sudah ada wajib pajak PBB yang memanfaatkan layanan itu. Ia menekankan perlu ada penyesuaian sistem dan sosialisasi kepada masyarakat yang belum mengetahui pelayanan tersebut.

Dikatakan, mendekati jatuh tempo pembayaran pada 30 September belum semua wajib pajak membayar kewajibannya. Padahal di 2014 ini pemkot menargetkan penerimaan PBB mencapai Rp 46 miliar. Tahun lalu, realisasi PBB Kota Yogyakarta sebesar

Rp 44.35 miliar dari target Rp 42 miliar.

Pihaknya berharap hingga jatuh tempo, realisasi PBB bisa mencapai 75 persen. "Rata-rata tiap tahun saat jatuh tempo juga 75 persen," katanya.

Ia menyatakan, imbauan kepada masyarakat untuk segera membayar PBB sebelum jatuh tempo juga sudah dilakukan. Seperti mengumumkan melalui pesan di videotron atau dari spanduk-spanduk di lokasi-lokasi strategis.

■ ed : yusuf assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005